

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM PENGADILAN NEGERI OLEH MAHKAMAH
AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENGABAIAN PELAKSANAAN
WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

INTISARI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

FREDERIKUS BELE
17312858

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

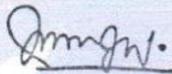
2022

PENGESAHAN INTISARI

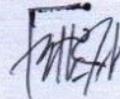
Kupang, 27 Juli 2022

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401



Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum.
NIDN :0828057502

MENGESAHKAN

REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA
WACANA KUPANG

DEKAN
FAKULTAS HUKUM


Dr. Ir. AYUB URBANUS L. MEKO, M.si
NIDN. 082146601
Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHAWACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpon (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

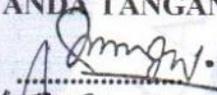
Pada hari ini Rabu Tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) Juli Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan L U L U S mahasiswa :

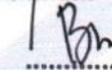
Nama : Frederikus Bele
NIM : 17312858
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Pengabaian Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

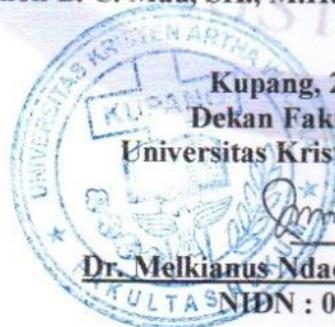
PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
Sekretaris : Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum
Anggota : 1. Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum
2. Tontji CH. Rafael, S.H., MH
3. Ellon B. C. Mau, SH., M.Hum





Kupang, 27 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana


Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul Skripsi Penulis Adalah: Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Pengabaian Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan Masalahnya yang dikaji adalah: mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tetapi dibatalkan oleh mahkamah agung dengan putusan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif yakni dalam hal ini penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan serta menjelaskan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka yang menjadi kesimpulan sesuai dengan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum:
 - a. Terdakwa Bukan Direktur Utama.
 - b. Terdakwa Tidak Tepat Didakwa Dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Alasan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan:
 - a. Perusahaan Menerbitkan Data Fiktif;
 - 1) Debitur Fiktif.
 - 2) Piutang Fiktif.
 - b. Terdakwa Selaku Komisaris Utama Memberikan Pernyataan Jaminan Penandatangan Penerbitan MTN Kepada Direktur Utama.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Pengabaian Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku Acuan:

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, PT RajaGrafindo persada
- H. Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Jur. Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Muliaman D Hadad, Ph.D, 2015, *Buku Saku Otoritas Jasa keuangan*, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press
- Wacana Intelektual, 2008, *Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUHPerdata KUHP KUHAP*, Jakarta, Wipress

Regulasi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Jurnal Ilmiah:

- Annisa Arifka Sari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Di Indonesia* Vol. 01/No.02, Desember 2019, hlm. 185

Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Vol.8/ No.2, Maret 2012, hlm. 33

Radhiyan Khairil Anwar, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasar Modal*, Vol.12/No.2, Agustus 2015. hlm 94

Susanti Ante, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm 99

Indra Janli Manope, *Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Vol.Vi/No.2/Mar-Apr/2017. hlm 107

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 337/Pid.B/2019/PN.JKT.PST

Putusan Kasasi Mahkamah Agung: 851 K/Pid.Sus/2020